

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2015-2018

INTISARI

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu faktor untuk menentukan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketimpangan antar daerah. Untuk mengukur sejauh mana perkembangan pembangunan manusia, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Akses Sanitasi dan Jumlah Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat periode 2015-2018. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel dengan model *fixed effect*. Berdasarkan analisis yang dilakukan hasil analisis menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), akses sanitasi dan jumlah sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Akses Sanitasi dan Jumlah sekolah.

FACTORS AFFECT TO HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN WEST JAVA PROVINCE YEAR 2015-2018

ABSTRACT

Human development index is one of the factors to determine the welfare of the community in an area. Differences in the level of community welfare lead to inequality and disparities between regions. To measure the extent of human development, this study aims to analyze on the effect of the Regency/City Minimum Wage (UMK), Regional Gross Domestic Product (RGDP), sanitation access and number of school on the Human Development Index (HDI) in west java Province period 2015-2018. The analytical tool used is panel data. The result of the analysis show that the district/city minimum wage (UMK), Regional Gross Domestic Product (RGDP), sanitation and the number of school have a positive and significant effect on the Human Development Index.

Keywords: *Human Development Index (HDI), Regency/City Minimum Wage (UMK), Regional Gross Domestic Product (RGDP), Sanitation access and Number of schools.*

LATAR BELAKANG

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan, namun pada hakekatnya pembangunan hanya ditunjukkan untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Artinya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat pemerataan distribusi hasil pembangunannya. Jadi, pembangunan ekonomi dinyatakan berhasil apabila suatu negara dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur salah satu aspek yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yaitu derajat pembangunan ekonomi.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pembangunan ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu komponen yang dapat dihitung dari indeks harapan hidup, indeks standar hidup layak dan indeks pendidikan. Didalam perhitungan indeks harapan hidup, indeks standar hidup layak dan indeks pendidikan akan melibatkan komponen ekonomi maupun non ekonomi misalnya kualitas kesehatan, kualitas pendidikan dan kependudukan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah dianggap relevan untuk digunakan sebagai tolak pada dasarnya perekonomian suatu negara akan mengalami perkembangan baik di negara maju maupun negara berkembang. Pendekatan pembangunan bukan hanya menentukan perhitungan dan pertumbuhan ekonominya saja akan tetapi lebih menentukan pembangunan kapasitas manusia.

Didalam ayat Al-Quran dan riwayat tabi'in salah satu yang bisa dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Bahwa pembangunan tidak semata-mata membangun fisik, tetapi juga suatu hal yang bersifat immaterial dan spiritual. Hal ini dapat dibuktikan pada Al-Quran surah Al-A'raaf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS Al-A'Raaf : 96).

Dalam membangun sumber daya manusia dapat diukur dengan menggunakan parameter yang populer saat ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah disetujui oleh dunia melalui *United Nation Development Programme* (UNDP). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia dapat disebabkan karena kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduknya. Melalui Ipm dapat diketahui perkembangan kualitas sumber daya manusia setiap provinsi di Indonesia. BPS menghitung IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996, yaitu provinsi. Tujuan untuk di publikasikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap provinsi adalah untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan kualitas manusianya. Adapun tabel dibawah ini yang menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan di pulau Jawa sebagai berikut:

TABEL 1.1**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
di Pulau Jawa tahun 2015-2018 (indeks)**

Provinsi	2015	2016	2017	2018
Banten	70,27	70,96	71,42	71,95
DKI Jakarta	78,99	79,60	80,06	80,47
Jawa Barat	69,50	70,05	70,69	71,30
Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52	71,12
Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	70,77
DI Yogyakarta	77,59	78,38	78,89	79,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa dalam Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat lebih unggul diantara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan secara bertahap dalam kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2015-2018 yang pada awalnya sebesar 69,50 indeks dan terus meningkat sampai tahun 2018 hingga 71,30 indeks. Akan tetapi IPM Provinsi Jawa Barat mendapati urutan keempat di pulau jawa.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu alat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meratanya pendapatan masyarakat. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menaikkan produktifitas perekonomian sehingga tingkat pendapatan juga mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan merupakan suatu cerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Paradigma pembangunan yang saat ini sedang berkembang adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dengan pembangunan manusia dan dapat dilihat dengan kualitas hidup manusia disetiap negara. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya sangat membutuhkan modal manusia yang berkualitas agar dapat bisa menjadi modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas pemerintah dapat bisa memberikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Adapun kualitas SDM dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia dan dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan yaitu pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian dengan cara menerapkan hidup sehat, pembangunan pendidikan dengan cara arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang (N. Dewi, Yusuf, & Iyan, 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan IPM adalah kurang meratanya distribusi pendapatan. Masyarakat masih mempercayai bahwa pendapatan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, yang artinya seseorang harus melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan. Fenomena yang terjadi bukanlah masyarakat enggan untuk bekerja hanya saja sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga akan berdampak terhadap pengangguran yang semakin tinggi (Meydiasari & Soejoto, 2017). Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia antara lain:

Kesenjangan permasalahan upah kaum buruh secara tidak langsung dapat mempengaruhi IPM, permasalahan upah buruh dapat mengakibatkan terhadap masalah kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hanya saja seorang buruh ingin mendapatkan hidup yang layak untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Upah atau gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan dari sebuah

perusahaan sebagai konsekuensi dari kedudukan sebagai seorang karyawan. Pada hakekatnya upah merupakan sumber utama penghasilan seseorang. Untuk menetapkan besarnya upah harus memberikan keadilan dan bersifat dinamis sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap karyawan (Ismanti, 2017).

Meningkatnya PDRB akan mengganti pola konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang yang berkaitan erat dengan IPM karena adanya daya beli yang termasuk dalam salah satu indikator terhadap IPM yaitu indikator pendapatan. Dengan tingginya produktivitas dan kreativitas maka penduduk dapat mengelola sumber daya yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi (Bhakti, Istiqomah, & Suprpto, 2017). Semakin tinggi PDRB maka akan semakin makmur kesejahteraan.

Derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup adalah salah satu indikator dari IPM. Angka kesehatan yang tinggi harus disertai dengan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang baik. Untuk pembangunan sanitasi yang baik terdapat 3 (tiga) bidang antara lain pembangunan pengelolaan sampah, pembangunan pengelolaan air limbah dan pembangunan pengelolaan saluran pembuangan. Pembangunan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang layak. Namun di negara berkembang seperti Indonesia pembangunan bidang sanitasi selalu menghadapi kendala pada minimnya pendapatan masyarakat, sehingga akan berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan sanitasi kesehatan (Bhakti et al., 2017).

Hubungan antara pendidikan dengan pembangunan manusia memang sudah banyak terjadi, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan melakukan cara untuk mengangkat kehormatan bangsa dan meningkatkan kemakmuran rakyat yaitu dengan cara melalui pengembangan pendidikan. Seringkali dipercayai bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan berkaitan positif dengan tingkat penghasilan. Sama dengan kesehatan, pendidikan menjadi salah satu aspek penting untuk mempercepat pembangunan manusia. Dengan berbagai upaya dilakukan untuk mencegah tingginya angka anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi, memperbaiki kualitas dalam pembelajaran, mengembangkan infrastruktur dan sarana sekolah. Perbaikan tidak hanya dengan kuantitas, tetapi juga dengan memperbaiki kualitas dan layanan pendidikan (Rubiyatno, 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, mengenai keterkaitan antara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Akses Sanitasi dan Jumlah sekolah maka peneliti menarik untuk penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018”**

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan mungkin dapat menjadi suatu hal yang bisa dijadikan untuk perdebatan karena pembangunan dapat dilihat dalam perspektif dan ukuran yang berbeda. Hal ini merupakan pembangunan hendaknya mencakup kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Pembangunan awalnya hanya ditujukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi suatu negara, namun pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu akan

menghasilkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi pada negara berkembang (Prawoto, 2016).

a. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui sumber daya manusia yang mencakup untuk dapat melaksanakan pembangunan. Dengan adanya sumber daya manusia yang baik maka dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang semakin lancar dalam berbagai sektor. Maka kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM (Haryadi & Riani, 2018). Hendaknya pemerintah dapat memperhatikan hal tersebut terutama jika subjek dan objek pembangunan yaitu manusia, sehingga pembangunan manusia yang kemudian dapat mencakup pembangunan di berbagai sektor dan akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada pada suatu wilayah pemerintahan tersebut. Pada sebagian negara khususnya negara yang sedang berkembang pembangunan manusia sangatlah penting hal ini disebabkan karena banyaknya negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi, masih gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan dapat meningkatkan kemiskinan (Azahari & Trisakti, 2000).

b. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Hudiyanto, 2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan suatu indikator pembangunan yang dimunculkan oleh UNDP, yang dinyatakan bahwa jika ingin kehidupan yang lebih baik tidak hanya diukur secara ekonomi saja melainkan mempertimbangkan tiga komponen yaitu panjangnya umur manusia, pendidikan dan standar hidup.

Indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur untuk tingkat kesejahteraan dapat dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran konsumsi. Indeks pembangunan manusia diperlukan guna dapat menggolongkan suatu Negara dalam Negara maju, Negara berkembang atau bahkan Negara terbelakang serta untuk dapat mengukur dan menentukan kebijakan ekonomi pada peningkatan kesejahteraan negara.

UNDP telah membuat indikator pembangunan yang lain, untuk penambahan beberapa indikator yang telah ada. Dasar yang melandasi ide tersebut untuk pentingnya memperhatikan kualitas sumberdaya manusia. Menurut UNDP, pembangunan harusnya ditujukan terhadap pembangunan sumber daya manusia. Dalam hal ini dapat didasari oleh oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya jalan hidup manusia yang bebas (Sosilawati, 2017).

c. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Rumus umum yang dapat digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia yaitu sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3) \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana:

X_1 = Indeks Harapan Hidup

X_2 = Indeks Pendidikan

X_3 = Indeks Standar Hidup Layak

Dari setiap komponen diatas akan terlebih dahulu untuk dihitung indeksnya kemudian akan menghasilkan nilai antar 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Biasanya indeks akan menghasilkan angka yang lebih bagus jika dikalikan 100 untuk memudahkan dalam analisa. Untuk penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus dasar yang sebagai berikut:

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i \cdot I_i = \frac{X_i - \text{Min} X_i}{\text{Max} X_i - \text{Min} X_i} \dots \dots \dots (2.2)$$

Keterangan:

I_i = Indeks komponen IPM ke I dimana $I = 1, 2, 3$

X_i = Nilai indikator komponen IPM ke i

Max X_i = Nilai maksimum X_i

Min X_i = Nilai minimum X_i

d. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Komponen tersebut merupakan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

- 1) Angka Harapan hidup (AHH) saat lahir merupakan menunjukkan rata-rata seberapa banyak tahun yang dapat diperoleh oleh seseorang sejak lahir. AHH sesuatu yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat dan diperhitungkan melalui hasil sensus penduduk.
- 2) Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengukur menjalani pendidikan formal. Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.
- 3) Angka Harapan Lama Sekolah merupakan lama sekolah yang akan dirasakn terhadap anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Angka harapan lama sekolah dapat dihitung melalui penduduk yang berusia 7 thun ke atas. Angka harapan lama sekolah ini dapat mengukur perkembangan pembangunan memlalui system pendidikan.

Standar hidup layak dengan indikator pengeluaran perkapita dapat ditentukan melalui pengeluaran perkapita dan kapasitas daya beli (*Purchasing Power Parity*) data dapat diperoleh melalui sensunas, dan dapat dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Kemudian dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita yang dibuat konstan atau riil dengan tahun (Sendow dkk, 2018). Berdasarkan kajian mengenai Indeks Pembangunan Manusia menurut UNDP, untuk mengetahui capaian Indeks Pembangunan Manusia antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan kedalam beberapa kategori, yaitu:

- a) $IPM < 60$: IPM rendah
- b) $60 < IPM < 70$: IPM sedang
- c) $70 < IPM < 80$: IPM tinggi
- d) $IPM < 80$: IPM sangat tinggi

2. Minimum Kabupaten/Kota

a. Pengertian Upah Minimum

Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, Ayat 30 Upah merupakan hak bagi para peker/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau tempat kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja atau kesepakatan. Peraturan perundang-

undangan termasuk tunjangan bagi para pekerja atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Menurut (Hutagahung, 2017) menjelaskan bahwa upah minimum merupakan upah yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas permintaan dewan pengupahan, berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup minimum perbulannya. Upah minimum dapat dibagi menjadi:

- 1) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Provinsi (UMP) merupakan upah yang besarnya dapat ditentukan oleh dewan pengupahan yang terdapat pada setiap masing-masing kabupaten/kota dan dapat disesuaikan terhadap kebutuhan minimumnya.
- 2) Upah Minimum Kabupaten/Kota Sektoral (UMKS) atau Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMKPS) merupakan upah yang besarnya dapat ditentukan oleh dewan pengupahan yang terdapat pada setiap masing-masing kabupaten/kota dan sistem perhitungannya dapat dilihat dari perkembangan sektor industri yang bersangkutan.

b. Upah Efisiensi

Teori ini menjelaskan bahwa upah yang tinggi akan membuat para pekerja akan lebih produktif. Pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja akan dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memotong upah walaupun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Meskipun akan terdapat mengurangi tagihan upah perusahaan, pengurangan upah juga dapat terjadi jika teori itu benar dapat merendahkan kemampuan pekerja dan laba pekerjaan. Teori ini lebih banyak digunakan di negara-negara miskin, menyatakan bahwa pengaruh teori ini dapat mempengaruhi nutrisi dan para pekerja yang lebih baik maka akan menghasilkan yang lebih produktif. Perusahaan akan beroperasi jika pembayaran lebih efisien pekerjaannya dengan upah yang tinggi, maka perusahaan dapat menganggap bahwa mempertahankan upah diatas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan adalah menguntungkan.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dapat dihasilkan berdasarkan kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun (Khanela dkk., 2017). Produk Domestik Regional bruto terdiri dari dua harga yaitu sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan merupakan nilai dari suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai acuan atau tahun dasar untuk harga tersebut.
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku merupakan nilai dari suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut.

4. Akses Sanitasi

Sanitasi merupakan tindakan dari seseorang terhadap lingkungan yang berada di sekitarnya supaya lingkungan terkondisikan bebas dari penyakit dan selalu bersih. Lingkungan yang bersih dan sehat akan terbebas dari suatu penyakit. Secara keseluruhan sanitasi adalah penerapan dari prinsip-prinsip yang akan membantu mempertahankan, memperbaiki atau mengembalikan

kesehatan yang baik pada manusia. Penerapan sanitasi sangat penting untuk dilakukan karena berdampak baik pada kesehatan manusia.

Menurut dokumen MDGs membatasi pengertian sanitasi sebagai akses terhadap jamban. Namun menurut lembaga-lembaga internasional seperti WHO sanitasi layak adalah sebuah jamban yang memiliki sistem pembuangan limbah yang tidak mencemari lingkungan. Maka lembaga tersebut menggunakan konsep sebagai tolak ukur target MDGs (Adhi, 2009). Sementara itu sanitasi dalam industri makanan berarti membersihkan seluruh permukaan baik lantai, meja dan peralatan, maupun pekerja yang bersentuhan dengan produk makanan melalui perlakuan yang efektif dalam memusnahkan mikrobia yang membahayakan kesehatan masyarakat dan secara substansial mengurangi jumlah mikrobia yang tidak diinginkan lainnya tanpa mengganggu keamanan makanan bagi konsumen. Dengan demikian sanitasi mencakup pada bidang pangan, dilakukan pada semua benda yang terkontak langsung dengan makanan.

5. Jumlah Sekolah

Berdasarkan pada Undang-Undang No.2 tahun 1989 sekolah merupakan satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah merupakan suatu lembaga untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian dari integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya yang bersifat aktif dan kreatif artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik (Pauziah, 2017).

Pendidikan merupakan suatu permasalahan yang besar menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Karena itu, tuntutan reformasi politik, ekonomi, hak azasi manusia, sosial dan sistem pemerintahan tidak dapat membuahkan hasil yang baik tanpa reformasi pendidikan. krisis multidimensi yang melanda Negara

Indonesia tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi melainkan dengan krisis pada system pendidikan. Kajian relasi antara pendidikan dan pembangunan manusia memang sudah banyak dilakukan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat adalah dengan cara melalui jalam pengembangan pendidikan. Banyak diyakini bahwa tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menghasilkan korelasi positif dengan tingkat penghasilan atau kemakmuran yang tinggi. Pendidikan merupakan bidang sentral yang harus dijalankan dengan serius untuk dapat mempercepat pembangunan manusia (Rubiyatno, 2012).

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Upah Minimum dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tingkat upah minimum tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak buruh dan masih jauh dari pengeluaran riil buruh dengan upah yang didapatnya. Rendahnya daya upah minimum dapat menjadikan beban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Minimnya tingkat upah minimum yang diterima oleh para buruh secara tidak langsung dapat mempengaruhi produktivitas buruh dan daya saing sumber daya manusia menjadi rendah (Sari & Priati, 2016).

2. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi akan menjadikan pembangunan manusia menjadi lebih baik lagi, begitu pula sebaliknya. Sementara itu kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia adalah dengan meningkatkan pendapatan pemerintah yang kemudian dapat diinvestasikan untuk pembangunan manusia.

3. Hubungan Akses Sanitasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salahsatu indikator dari IPM adalah kesehatan dan panjangnya umur yang dilihat dari angka harapan hidup. Kesehatan yang tinggi harus didukung dengan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang baik. Pembangunan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, yang termasuk indikator keberhasilannya selalu diukur dari Indeks Tingkat Harapan Hidup, Indeks Tingkat Kematian Bayi dan Angka Penyakit yang disebabkan oleh air contohnya demam berdarah, diare dan tifus. Akan tetapi Indonesia selalu minim dalam pendapatan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan sanitasi layak (Soeranto, 2004).

4. Hubungan Jumlah Sekolah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Investasi dalam hal pendidikan sangat dibutuhkan maka pemerintah harus membangun suatu sarana dan system pendidikan yang baik. Karena pengeluaran pembangunan dalam sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang berada di daerah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota.

Pada penelitian ini data yang akan digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga secara berkali yang berupa data *time series* dan *cross section* dalam bentuk data tahunan selama periode 2015-2018. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dan beberapa instansi yang terkait serta dari berbagai sumber kepustakaan lain. Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Sanitasi Layak, dan Jumlah Sekolah.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi keputusan yaitu dengan menggunakan bahan-bahan keputusan berupa artikel, tulisan ilmiah, jurnal, laporan-laporan penelitian, publikasi resmi yang dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan berupa data panel yang merupakan gabungan data

time series dan *cross section* pada periode 2015-2018. Untuk memperoleh data yang signifikan dan akurat, data yang diolah pada penelitian ini didapatkan dari instansi-instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji park, nilai probabilitas dari semua variabel independen tidak signifikan pada tingkat 1%. Keadaan ini menunjukkan bahwa adanya varian yang sama atau terjadi homoskedastisitas antara nilai-nilai variabel independen dengan residual setiap individu itu sendiri. Berikut ini data output hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji park yang ditunjukkan pada tabel 5.1:

Tabel 5.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan uji park

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-54,58366	91,09021	-0,599226	0,5508
LOG(UMK?)	-2,266988	2,433023	-0,668430	0,5122
LOG(PDRB?)	0,475378	4,215159	0,065876	0,9476
AKSESSANITASI?	0,680273	1,756689	0,541405	0,5967
LOG(JS?)	4,639077	6,770680	0,685172	0,4953

Sumber: Eviews7, data diolah

Berdasarkan tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas UMK sebesar 0,5122, PDRB sebesar 0,9476, Akses Sanitasi sebesar 0,5967 dan Jumlah Sekolah sebesar 0,4953 yang berarti $> 0,01$ yang artinya bahwa data variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena nilai probabilitas seluruh variabel independen $> 0,05$.

2. Uji Multikolinieritas

TABEL 5.2
Hasil Uji Multikolinieritas

	UMK	PDRB	AKSESSANITASI	JS
UMK	1,000000	0,756178	0,446548	0,536187
PDRB	0,756178	1,000000	-0,237892	0,489773
AKSESSANITASI	0,446548	-0,237892	1,000000	0,532913
JS	0,536187	0,489773	0,532913	1,000000

Sumber: Eviews7, data diolah

Berdasarkan tabel 5.2 diatas, setelah melakukan pengujian korelasi parsial antar variabel independen secara bergantian didapatkan dan disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya masalah multikolinieritas antara variabel independen. Hal ini terlihat dari tidak adanya angka koefisien korelasi diatas 0,8 maka dapat dikatakan lolos dari uji multikolinieritas

B. Pemilihan Model Analisis

Dalam model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan *Common Effect*, pendekatan *Fixed Effect* dan pendekatan *Random Effect*. Untuk memilih model analisis mana yang tepat antara *common effect*, *fixed effect* atau *random effect* dapat dilakukan uji Chow dan uji Hausman.

1. Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan metode (*Common Effect* atau *Fixed Effect*) dan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 5.3
Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	896,462751	(26,77)	0,0000
Cross-section Chi-square	617,332968	26	0,0000

Sumber: Eviews7, data diolah

Berdasarkan tabel 5.3 hasil uji Chow dapat dilihat bahwa

H0: Common Effect Model

H1: Fixed Effect Model

Nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ maka H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya berdasarkan uji Chow model analisis yang terbaik digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan metode (*Fixed Effect* atau *Random Effect*) dan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 5.4
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section Random	10,117683	4	0,0385

Sumber: Eviews7, data diolah

C. Hasil Estimasi Model Data Panel

Berdasarkan uji spesifikasi yang telah dilakukan yaitu dengan uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa model yang tepat untuk penelitian ini yaitu Fixed Effect model. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 27 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat selama periode 2015-2018 (4 tahun).

TABEL 5.5
Hasil Estimasi Model Fixed Effect

Dependent Variable: IPM?				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29,43878	12,98638	2,266896	0,0262
LOG(UMK?)	5,347621	0,832087	6,426753	0,0000
LOG(PDRB?)	1,372572	1,399597	0,980691	0,0098

AKSESSANTASI?	0,006555	0,003113	2,105840	0,0385
LOG(JS?)	0,313928	0,201281	1,559649	0,0009
Fixed Effects (Cross)				
_BOGOR—C	-4,876147			
_SUKABUMI—C	-5,387819			
_CIANJUR—C	-5,732147			
_BANDUNG—C	-0,626270			
_GARUT—C	-3,755206			
_TASIKMALAYA—C	-4,258264			
_CIAMIS—C	1,346782			
_KUNINGAN—C	0,857202			
_CIREBON—C	-1,630515			
_MAJALENGKA—C	-1,829482			
_SUMEDANG—C	-0,034953			
_INDRAMAYU—C	-4,404790			
_SUBANG—C	-2,498611			
_PURWAKARTA—C	-3,535958			
_KARAWANG—C	-6,107002			
_BEKASI—C	-2,684905			
_BANDUNGBARAT—C	-4,040176			
_PANGANDARAN—C	0,247989			
_KOTABOGOR—C	2,772540			
_KOTASUKABUMI—C	4,746001			
_KOTABANDUNG—C	6,777964			
_KOTACIREBON—C	5,972804			
_KOTADEPOK—C	6,976829			
_KOTABEKASI—C	6,883467			
_KOTACIMAHI—C	6,535789			
_KOTATASIKMALAYA—C	2,869246			
_KOTABANJAR—C	5,415632			
	Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0,998276	Mean dependent var		70,02574
Adjusted R-squared	0,997604	S.D. dependent var		4,919341
S.E. of regression	0,240807	Akaike info criterion		0,226110
Sum squared resid	4,465094	Schwarz criterion		0,995981
Log likelihood	18,79005	Hannan-Quinn criter.		0,538265
F-statistic	1485,891	Durbin-Watson stat		1,820880
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: Eviews7, data diolah

D. Uji Statistik

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi uji signifikansi parameter individual (Uji T-statistik), uji signifikansi bersama-sama (Uji F-statistik) dan koefisien Korelasi (R^2)

1. Uji T-statistik

Dalam Uji T ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (UMK, PDRB, Sanitasi, Jumlah sekolah) secara Individual signifikan terhadap variabel dependen (IPM) dengan memperhatikan standar probabilitas $\alpha < 0,05$.

TABEL 5.6
Hasil Uji T-statistik

Variabel	Koefisien Regresi	T-statistik	Prob.
LOG(UMK?)	5,347621	6,426753	0,0000
LOG(PDRB?)	1,372572	0,980691	0,0098
AKSESSANITASI?	0,006555	2,105840	0,0385
LOG(JS?)	0,313928	1,559649	0,0009

Sumber: Eviews7, data diolah

Berdasarkan tabel 5.6 dapat dilihat bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Sanitasi dan Jumlah Sekolah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) variabel UMK, PDRB dan Jumlah Sekolah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada taraf signifikan 1%. Sedangkan variabel Sanitasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada taraf 5%.

2. Uji F-statistik

Uji F-statistik digunakan untuk menunjukkan apabila semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila hasil prob F $< 0,05$, maka model regresi dapat digunakan. Berikut ini adalah besarnya prob F-statistik setelah dilakukan estimasi regresi data panel.

TABEL 5.7
Hasil Uji F-statistik

Regresi Fixed Effect	
Prob(F-statistic)	0,000000
F-statistik	1485,891
R-squared	0,998276
Adjusted R-squared	0,997604

Sumber: Eviews7, data diolah

Berdasarkan tabel 5.7 diatas menunjukkan bahwa besarnya F-statistik sebesar 1485,891 dan nilai probabilitas F sebesar 0,000000. Oleh karena itu angka prob F $<$ dari 0,05, maka dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai yang koefiefisien

determinasi yang mendekati nol berarti menandakan terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dari dependennya, sedangkan nilai yang koefisien determinasi yang mendekati satu menandakan bahwa variabel independen yang terdapat pada model mampu menerangkan prediksi informasi terhadap setiap perubahan variabel dependen.

TABEL 5.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Regresi Fixed Effect	
Prob(F-statistic)	0,000000
F-statistik	1485,891
R-squared	0,998276
Adjusted R-squared	0,997604

Sumber: Eviews7, data diolah

Berdasarkan tabel 5.8 diatas menunjukkan bahwa nilai R-squared sebesar 0,998276, yang berarti bahwa perubahan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 99,82% dipengaruhi oleh variabel UMK, PDRB, Sanitasi, Jumlah Sekolah. Sedangkan sisanya yaitu 0,18% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

E. Interpretasi Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel, maka selanjutnya melakukan analisis dan pembahasan terkait variabel independen yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Sanitasi dan Jumlah sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen. Tujuan analisis dan pembahasan untuk menginterpretasikan hasil pengolahan statistic data panel ke dalam teori ekonomi yang telah ada.

1. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel UMK berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 5,347621 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000 terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018. Maka jika terdapat kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 1% maka Indeks Pembangunan manusia akan meningkat sebesar 5,34 poin di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga bahwa pengaruh positif dan signifikan antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Ismanti, (2017) yang menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Yang dimaksud dengan upah supaya dapat meningkatkan standar hidup manusia, penetapan jumlah upah minimum supaya para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Romi dan Umiyati, 2018). Dari peningkatan upah minimum tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga akan berdampak terhadap peningkatan IPM.

Hal ini terbukti karena terjadi kenaikan pada kualitas kesejahteraan masyarakat. Penetapan jumlah upah minimum supaya buruh atau para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan keperluan rumah tangga. Dari peningkatan upah tersebut yang diterima oleh para buruh dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dampaknya akan terjadi pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Zamharir, 2016)

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 1,372572 dan nilai probabilitas sebesar 0,0098 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018. Maka jika terdapat kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1% maka Indeks Pembangunan manusia akan meningkat sebesar 1,37 poin di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga bahwa pengaruh positif dan signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. Pengaruh Sanitasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel Sanitasi berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,006555 dan nilai probabilitas sebesar 0,0385 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018. Maka jika terdapat kenaikan Sanitasi sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 0,006 poin di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga bahwa pengaruh positif dan signifikan antara Sanitasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Melliana dan Zain, (2013) yang menunjukkan bahwa variabel Sanitasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sanitasi merupakan salah satu fasilitas kesehatan dan pembangunan Sanitasi dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, tetapi di Indonesia masih minimnya pendapatan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki sanitasi layak. Yang termasuk indikator keberhasilannya diukur dari Indeks Tingkat Harapan Hidup, Indeks Tingkat Kematian Bayi dan Angka Penyakit yang disebabkan oleh air.

4. Pengaruh Jumlah Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel Jumlah Sekolah berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,313928 dan nilai probabilitas sebesar 0,0009 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018. Maka jika terdapat kenaikan Jumlah sekolah sebesar 1% maka Indeks Pembangunan akan meningkat sebesar 0,31 poin di Provinsi Jawa Barat. Semakin meningkat fasilitas jumlah sekolah maka akan meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga bahwa pengaruh positif dan signifikan antara Jumlah Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Populasi yang digunakan adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan tersebut diperlukan supaya angkanya lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian mengenai analisis pengaruh UMK, PDRB, Sanitasi dan Jumlah Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya, apabila upah minimum kabupaten/kota meningkat maka akan dapat menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan dugaan hipotesis yang menyatakan bahwa UMK dapat berpengaruh positif terhadap IPM.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya, apabila PDRB meningkat maka akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan dugaan hipotesis yang menyatakan bahwa PDRB dapat berpengaruh positif terhadap IPM.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel akses sanitasi yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya, apabila kelayakan sanitasi meningkat maka akan dapat menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan dugaan hipotesis yang menyatakan bahwa sanitasi dapat berpengaruh positif terhadap IPM.
4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel jumlah sekolah yang mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya apabila jumlah sekolah meningkat maka akan dapat menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan dugaan hipotesis yang menyatakan bahwa sanitasi dapat berpengaruh positif terhadap IPM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pengaruh UMK, PDRB, Akses Sanitasi dan Jumlah Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan upah minimum kabupaten/kota untuk mendorong pendapatan masyarakat, dengan adanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota masyarakat diharapkan dapat mempunyai daya beli yang lebih besar dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga dengan terwujudnya kondisi tersebut diharapkan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Dalam meningkatkan IPM maka pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan output perkapita yaitu PDRB harga konstan. Peningkatan pertumbuhan output

maka akan berpengaruh terhadap konsumsi penduduk. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan dapat mendorong masyarakat untuk tidak hidup konsumtif, masyarakat mampu menyisihkan untuk ditabung sebagai modal dalam peningkatan produktivitas dana pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.

3. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan dan melakukan perbaikan sarana fasilitas kesehatan seperti memberikan dana untuk rumah tangga yang tidak memiliki sanitasi layak, untuk dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan dapat mengurangi jumlah kematian masyarakat akibat terserang penyakit. Sehingga masyarakat mendapatkan kesehatan yang layak.
4. Pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan daerah diharapkan tidak hanya fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga harus melihat dari aspek pendidikan. Dengan melakukan perbaikan dan peningkatan sarana-sarana pendidikan seperti menambahkan jumlah sekolah dan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu sehingga memudahkan masyarakat untuk sekolah tanpa hambatan oleh biaya sekolah.
5. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan dasar dan dapat dikembangkan secara luas. Sebaiknya menambahkan data terbaru untuk memperoleh gambaran terbaru tentang perkembangan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu UMK, PDRB, sanitasi dan jumlah sekolah. Sebenarnya masih banyak variabel atau indikator yang dapat mempengaruhi IPM, tetapi karena ada berbagai keterbatasan bagi data *time series* yang digunakan masih standar. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan indikator-indikator yang lain, juga metode lainnya dan tahun yang lebih banyak untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, J., Sulaiman, M., Zailani, S., Shahrudin, M. R., Saw, B., Wu, C. L., Challoumis, C. (2015). A Study On The Impact Of Governmen Development Indeks In North Sumatra, Indonesia, *Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 16(2), 39–55. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.0625>
- Adhi, E. T. (2009). Pelayanan Sanitasi Buruk Akar Dari Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Jurnal Analisis Sosial*, 14, 76–88.
- Arisman, A. (2018). Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 113–122. <https://doi.org/10.15408/sjie.v7i1.6756>
- Azahari, A., & Trisakti, U. (2000). *Pembangunan sumberdaya manusia dan indeks pembangunan manusia sektor pertanian*. 15(1), 56–69.
- Basuki, A. T. (2017). *Ekonometrika Dan Aplikasi Dalam Ekonomi (Dilengkapi Aplikasi Eviews 7)*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprpto, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012.

- EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(4), 452.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.2162>
- Brahmono, B., Idris, M., & Wahyudi, A. (2017). Pengaruh Jumlah SMU, Jumlah Guru dan Jumlah Ruang Kelas Terhadap Indeks Pembangunan yang Terdapat di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 22–28. Retrieved from <http://www.ejurnal-stitpringsewu.ac.id/index.php/JMPI/article/view/23>
- Damodar, G. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Selamba Empat.
- Dewi, F. U. (2014). *Analisis Pembangunan Manusia (Human Development) Povinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2011. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*, Volume 18
- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. (2016). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- Diastama, A. R., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Surakarta, U. M. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*.
- Haryadi, S., & Riani, W. (2018). *Measurement of the Human Development Index Inequality. 1*(March), 1–5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/5R42M>
- Hudiyanto. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Hutagahung, M. Z. (2017). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta Pusat: Sentralisme Production.
- Ismanti, K. (2017). Pengaruh Faktor Pendidikan , Konsumsi Protein , Konsumsi Kalori , Dan Upah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Bangsa Indonesi Kiki Ismanti Program Studi Teknik Informatika , FTMIPA Universitas Indraprasta PGRI Email : kiki161983@gmail.com. 9(1), 25–35.
- Khanela, P., Ratna, M., & Budiantara, I. N. (2017). Pemodelan PDRB Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline. *Jurnal Economics ITS*, 6(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i2.24985>
- Meydiasari, D. A. & Soejoto, A. (2017). Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia. *Jurnal pendidikan ekonomi manajemen dan keuangan. 01*(02), 116–126.
- Lestari, W. W., & Sanar, V. E. (2018). Analysis Indicator of Factors Affecting Human. *Jurnal Economics* 2(1), 11–18.
- Latuconsina, Z. (2017). *Pengaruh PDRB dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Indah*. 5(1), 408. Retrieved from <http://www.twirpx.com/file/1146261/>
- Melliana, A., & Zain, I. (2013). Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2(2), 237–242.
- Niswaty, R., Mano, J., & Akib, H. (2015). An analysis of the public service performance based on human development index in makassar city, Indonesia. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 13(6), 4395–4403.
- Pauziah, R. (2017). Penerapan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa Pada Pembelajaran Menirukan Pembacaan Pantun Anak Di Kelas Iv Sd Negeri 19. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 10(1), 42–46. Retrieved from <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/pgsd/article/view/2970>
- Prawoto, N., & Basuki, A. T. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*.

Yogyakarta: Danisa Media.

- Putri, H. P., & Poerwono, D. (2013). Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994 - 2010. *Journal Diponegoro of Economics*, 2, 1–10.
- Rahmah Merdekawaty, Dwi Ispriyanti, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (Sar). *Jurnal Gaussian*, 5, 525–534.
- Rubiyatno. (2012). Hubungan Status Dan Fasilitas Pendidikan Dengan Program pembangunan Perserikatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4(1), 64-77.
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 1–7.
- Sari, B. N., & Priati, P. (2016). Identifikasi Keterkaitan Variabel dan Prediksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Menggunakan Dynamic Bayesian Networks. *Jurnal INFOTEL (Informatika Telekomunikasi Elektronik)*, 8(2), 150. <https://doi.org/10.20895/infotel.v8i2.123>
- Sendow, R. H., Koleangan, R. A. M., Rotinsulu, T. O., Study, P., Ilmu, M., & Ratulangi, U. S. (2018). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.5. 2018. 19(5)*, 1–18.
- Soeranto,A. (2004). *Kualitas Manusia Indonesia dan Pembangunan Sarana Sanitasi*. Jakarta: Media Parcik.
- Sosilawati, H. D. (2017). *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur PUPR Pulau Sumatra*. Sumatra: Pusat Program dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Badan Pembangunan Infrastruktur.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro. (1997). *pembangunan ekonomi edisi ke-2*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi edisi ke-3*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM Yogyakarta.
- Yandle, B., Vijayaraghavan, M., and Bhattarai, M. (2002). The Environmental Kuznets Curve. *PERC Research Study*. Volume 02.
- Yuliadi, I., & Basuki, A. T. (2017). *Pengolahan Data Elektronik (SPSS 15 dan EVIEWS 7)*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Zamharir, A. 216. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB, dan Upah Minimum. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 1, No. 2, Mei 213* , 29-43.